

# Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan

Firmansyah<sup>1</sup>, Retnowati WD Tuti<sup>2,\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

<sup>1</sup> [firman.safar@gmail.com](mailto:firman.safar@gmail.com); <sup>2</sup> [retnowatiwdtuti@yahoo.com](mailto:retnowatiwdtuti@yahoo.com)

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received 2021-05-27

Revised 2021-06-20

Accepted 2021-06-30

### Keywords

Allocation of clean water, disaster prone areas, South Tangerang City

## ABSTRACT (10PT)

*The main difficulties in post-disaster are the lack of clean water availability, the residents have difficulty getting clean water, both for residents who do not want to leave their settlements, or for those who fled to other places. For example, during a flood, dug wells and pump wells submerge floodwaters in a few days, besides that in the evacuation places there are no clean water or adequate sanitation facilities. Therefore, the provision of clean water is absolutely necessary in disaster-prone areas. Provision can be done with water filtration facilities around the area or it can be a clean water tanker that can be distributed to people in need. The purpose of this study is to describe the implementation of the distribution of clean water allocation to communities in disaster prone areas as well as the supporting and inhibiting factors of such implementation. The research method is qualitative with data collection techniques from interviews, observations and documents studies. Data obtained with an interactive model based on three research focus variables namely, communication and coordination, resource support and disposition. The results showed that communication and coordination as a connecting channel between actors can foster a good disposition. Resource support has a major influence on whether or not the objectives of the allocation of clean water are to be achieved. Whereas the allocation disposition shows the implementor's ability to respond and represent. Does not rule out the possibility of the three variables that grow factors supporting and inhibiting that can be used as consideration for overcoming problems that arise.*

## PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Merupakan salah satu “bagian alam” yang tak dapat dipisahkan dari manusia dalam aktivitasnya. Ketergantungan masyarakat perkotaan terhadap air bersih yang baik sangat tinggi. Persoalan air bukanlah sekedar persoalan kualitas saja, tetapi persoalan kuantitas dan kontinuitas. Kesulitan akan mendapatkan air bersih karena ada kecenderungan bahwa kuantitas yang cukup tidak diupayakan dengan kontinuitas. Dalam ketentuan *Milenium Development Goal* mensyaratkan target pelayanan air bersih perkotaan minimal 80 % dari total penduduk. Dalam kehidupan moderen seperti sekarang ini, peranan air terasa semakin penting. Kebutuhan air masa kini tidak saja untuk keperluan pertanian, rumah tangga dan jalur perhubungan. Lebih dari itu juga untuk keperluan pembangkit energi, proses industri dan keperluan komersial.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka akan meningkat pula kebutuhan air untuk berbagai penggunaan. Di lain pihak, air yang tersedia jumlahnya relatif tetap, bahkan kualitasnya cenderung menurun karena pencemaran. Hal ini akan mengakibatkan munculnya konflik kepentingan atas air. Konflik air yang semula hanya bersifat antar individu atau kelompok masyarakat pengguna air, maka dapat berpotensi menjadi konflik antar Kabupaten/Kota yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi konflik atas air tersebut, maka perlu dilakukan alokasi air agar masyarakat pengguna akan mendapat air sesuai dengan haknya secara adil, efisien dan berkelanjutan. Cara pandang air sebagai komoditas ekonomi harus tetap memperhatikan fungsi sosial bagi masyarakat dan fungsi lingkungannya, antara lain untuk

memelihara keseimbangan lingkungan, kelangsungan hidup flora dan fauna, mencegah intrusi air asin, estetika dan kesehatan masyarakat. Pembagian air antar hulu-hilir maupun antar sektor pengguna air perlu di alokasikan sedemikian rupa agar diperoleh keadilan dan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Kawasan rawan bencana merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Potensi rawan bencana di Kota Tangerang Selatan terdapat tiga bencana yaitu bencana banjir, kekeringan, longsor.

Setiap terjadi bencana alam disuatu daerah, hal yang menjadi permasalahan pasca bencana adalah ketersediaan air bersih untuk keperluan minum dan sebagainya. Masyarakat kesulitan mendapatkan sumber air minum karena instalasi atau jaringan air bersih di kota atau wilayah rusak dan tidak berfungsi lagi. Selain memasok makanan, selimut dan pakaian ke wilayah pasca bencana, salah satu tugas darurat pihak atau lembaga adalah menyediakan air bersih di kantong-kantong pengungsian. Hal ini tidak mudah karena saat terjadi bencana, masyarakat umumnya terpecah di berbagai tempat dalam wilayah yang luas. Selain itu, infrastruktur jalan rusak dan moda angkutan tangki air belum tentu siap dalam waktu singkat.

Masalah air bersih pada kondisi bencana dapat terjadi akibat terganggunya sumber air karena kualitasnya berubah, menjadi keruh atau asin, hancurnya sistem perpipaan, rusaknya instalasi pengolahan, terganggunya sistem distribusi atau langkanya air di daerah pengungsian. Prioritas penanganan air bersih biasanya di dahulukan pada wilayah-wilayah pengungsian dengan sistem komunal, karena kebutuhan untuk mandi, mencuci, sedangkan untuk minum pada awal kejadian selama ini banyak di dominasi oleh air minum dengan botol kemasan, namun untuk jangka panjang mereka memasak air sendiri. Untuk wilayah – wilayah terpencil dan sulit terjangkau biasanya menggunakan sistem yang lebih sederhana dan kecil serta mudah di operasionalkan.

Dalam penelitian ini di latarbelakangi oleh beberapa masalah-masalah yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pertama, di daerah kecamatan Setu sebagai salah satu kecamatan di Kota Tangerang Selatan sudah menjadi langganan bencana, sumur air tanah milik warga yang memiliki kedalaman hanya 20-30 meter mengalami kekeringan. Kedua, bencana banjir yang melanda warga secara otomatis dapat mempengaruhi kualitas air bersih, dan warga sulit mendapatkan air bersih. Ketiga, bencana tanah longsor yang terjadi di kelurahan keranggan juga berdampak atas ketersediaannya air bersih. Keempat, masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat membutuhkan adanya air bersih, karena tidak mampu untuk membeli air kemasan. Kelima, dengan adanya bangunan hotel dan apartemen yang sudah menjamur di Kota Tangerang Selatan tidak menutup kemungkinan kualitas air bersih di sekeliling bangunan tersebut dapat terganggu.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan secara mandiri, urusan air minum untuk masyarakat kota. Wewenang ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2019-2039.

## TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 19880:1). Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi (*Disposition*)

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih Kepada Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan adalah program Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan kegiatan penyediaan air bersih yang bertujuan untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ditengah masyarakat mengenai kekurangan atau terbatasnya penerimaan cakupan dan akses air bersih dilingkungan masyarakat.

Berikut adalah beberapa Indikator Keberhasilan Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih Kepada Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan. Kinerja pelaksanaan implemementasi ini di tingkat masyarakat dinilai berhasil jika memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana air bersih
  1. Sarana air bersih yang berfungsi, dimanfaatkan serta memenuhi tingkat kepuasan masyarakat.
  2. Sarana air bersih yang dikelola secara efektif oleh masyarakat.
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat
  1. Sebagian besar masyarakat menerapkan penggunaan air bersih untuk kebutuhan air bersih.

2. Sebagian besar masyarakat menerapkan perilaku cuci tangan di tempat umum menggunakan air bersih.
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal
  1. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) disusun secara partisipatif melibatkan seluruh komponen masyarakat.
  2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibentuk untuk meningkatkan SDM dalam mengelola air bersih di lokasi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan apa adanya. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*). Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan dengan mengamati daerah-daerah yang rawan bencana serta penanganan pembagian alokasi air bersih di daerah rawan bencana. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan Pedoman Wawancara yang telah disusun dengan melibatkan beberapa unsur. Dokumentasi antara lain Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2019-2039

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian, wawancara dan hasil dokumentasi dari Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih Kepada Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan. Dalam mendeskripsikan hasil penelitian ini, dibagi menjadi beberapa indikator, antara lain.

### 1. Penyediaan Sarana Air Bersih

Kota Tangerang Selatan yang memiliki 7 kecamatan, pada setiap wilayah memiliki masalah yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu terkait dengan air bersih. Di wilayah Kecamatan Setu, warga yang memiliki sumur air tanah hanya memiliki kedalaman sekitar 20-30 meter saja, sehingga di saat musim kemarau sumur-sumur warga terdampak kekeringan. Selain itu, bencana banjir yang merendam rumah warga perumahan Pesona Serpong Kelurahan Kademangan juga mempengaruhi kualitas air bersih. Bencana tanah longsor yang terjadi di kelurahan keranggan juga berdampak atas ketersediaannya air bersih. Masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat membutuhkan adanya air bersih, karena tidak mampu untuk membeli air kemasan. Serta permasalahan selanjutnya yaitu dengan adanya bangunan hotel dan apartemen yang sudah menjamur di Kota Tangerang Selatan tidak menutup kemungkinan kualitas air bersih di sekeliling bangunan tersebut dapat terganggu. Dengan permasalahan tersebut, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi dalam meningkatkan fasilitas air bersih bagi warga membuat program pembangunan sumur bor yang bertujuan untuk penyediaan sarana air bersih bagi warga di Kota Tangerang Selatan. Penyediaan sarana air bersih di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini pembangunan sumur bor ini dinilai efektif dan berfungsi dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan air bersih.

## 2. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat

Perilaku hidup sehat yang sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan pribadi dan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat. Di masa pandemi Covid-19, cuci tangan menjadi salah satu kebiasaan baru yang sangat penting. Untuk daerah yang kekurangan air bersih menjadi masalah untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Bangunan dan Penataan Ruang menyediakan fasilitas cuci tangan dengan dilengkapi air bersih dan sabun untuk digunakan oleh masyarakat di tempat sarana umum, seperti pasar, tempat ibadah, dan tempat pelayanan publik.

## 3. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kelembagaan Lokal

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah untuk mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk mengubah dari ketidakmampuan mereka dalam memecahkan persoalan dikehidupan mereka kemudian dapat secara mandiri dan aktif untuk mengambil langkah dalam memperbaiki kehidupannya agar lebih baik.

Dalam hal kegiatan kerjasama antara KSM dengan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang selaku pengambil kebijakan terkait penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Tangerang Selatan. Adapun bentuk yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) pembangunan sarana air bersih;
- 2) pengembangan sarana air bersih ;
- 3) pemeliharaan sarana air bersih.

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari beberapa variabel berikut, antara lain:

1. Komunikasi, salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ini adalah dengan komunikasi, komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan baik agen pelaksana maupun masyarakat terhadap keberadaan kebijakan ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah dilakukannya sosialisasi dan pada pelaksanaannya dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari upaya komunikasi yang sudah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi baik itu melalui sosialisasi langsung maupun media online. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan, **transmisi** komunikasi dari Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, BPBD, kelurahan hingga kelompok masyarakat sudah terealisasi dengan baik melalui sosialisasi dan koordinasi mengenai penyediaan sarana air bersih. Sehingga informasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat diterima dengan **jelas**. **Konsistensi** komunikasi harus terus terjalin, karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara rutin melakukan rapat koordinasi yang melibatkan beberapa perangkat daerah, dimana salah satu pembahasannya mengenai daerah-daerah mana saja yang menjadi skala prioritas dalam penyediaan air bersih di Kota Tangerang Selatan.
2. Sumber Daya, Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dinas memberi tanggung jawab kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam hal pengelolaan dan perawatan sumur bor yang sudah di bangun. Kemudian ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang pada saat ini masih belum memadai serta minimnya anggaran sehingga masih terdapat beberapa sarana yang kurang layak.
3. Disposisi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat peduli dalam penanganan bencana. Instruksi Walikota Tangerang Selatan untuk selalu melindungi dan memberikan serta mendukung upaya penyelenggaraan alokasi air bersih merupakan tanggung jawab dinas terkait. Respon dari Kelompok Sawadaya Masyarakat (KSM) terhadap kebijakan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dalam hal penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang awalnya dirasa mengkhawatirkan dengan adanya pembangunan sumur bor ini dikarenakan dapat mengganggu jumlah debit air di rumah waga, tetapi setelah dibangun, tanggapannya cukup baik dan menerima kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengalokasian air bersih dan mempunyai tanggung jawab kepada



masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut, yaitu membentuk KSM sebagai operator dan pemelihara serta melakukan pemeliharaan untuk skala kerusakan. Tugas pokok dan fungsi pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air bersih berada di bidang sanitasi lingkungan, air minum dan penataan bangunan seksi air minum.

## KESIMPULAN

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi maka perlu diketahui faktor yang mempengaruhinya. Berikut kesimpulannya dari sisi implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terjadi selama ini baik antara Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun unsur kewilayahan lebih banyak menggunakan tipe komunikasi secara langsung karena lebih efektif dan efisien.
2. Dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya sarana prasarana di Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan kurang memadai. Meskipun belum terpenuhi semua, namun ada solusi dalam menghadapi masalah itu dan tidak menjadi penghalang untuk memberikan pembagian alokasi air bersih di daerah rawan bencana.
3. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Jadi dalam mewujudkan suatu tujuan kebijakan jika dilakukan secara bersama-sama akan lebih cepat tercapai daripada dilaksanakan secara parsial.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran untuk Implementasi ini berjalan dengan baik, yaitu:

1. Terkait dengan sumber daya manusia Seksi Air Minum Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan, perlu adanya penambahan staff dan peningkatan kualitas melalui pelatihan dan sharing pengalaman dan pengetahuan seperti seminar.
2. Memberikan penghargaan bagi staff berprestasi sehingga dapat memotivasi staff lain untuk bekerja lebih baik.
3. DBPR Kota Tangerang Selatan segera memperbaiki sarana yang telah rusak di beberapa lokasi air bersih.
4. Menyusun SOP terbaru yang jelas dan mudah dimengerti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Hadari, 1999. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta.
- L. Erlangga. Simandjuntak Payaman, 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta.
- Miles, Matthew & Huberman, A. Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing. London-England, Jai Press Inc.
- Finch, C. dan Crunkilton, J.R. 1984. Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content and Implementation. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

- Kodoatie, Robert J & Roestam S.J.Arief. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta, ANDY Yogyakarta.
- Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Penerjemah Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali.
- David C. Korten. 2000:12. Model Kesesuaian Implementasi Program
- Noviwijaya, A dan Ananda Rohman. 2013. Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja. Diponegoro Jurnal Accounting.

### **Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Mimum (SPAM)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2019-2039